



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 43 /404.101.2/B/2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/315/404.012/B/2021 TENTANG PENETAPAN NOMOR  
REKENING BENDAHARA PENGELUARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2022, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/315/404.012/B/2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/315/404.012/B/2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);
15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/315/404.012/B/2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/315/404.012/B/2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022, diubah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan  
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan  
2. Sdr. Pemimpin PT. Bank Pembangunan  
Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Ngawi.**
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/43/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 5 Januari 2022

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Dinas/Instansi	Nomor Rekening
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	0101012722
2.	SEKRETARIAT DPRD	0101011999
3.	INSPEKTORAT	0101012300
4.	RSUD Dr. SOEROTO	0101013577
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0101005566
6.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0101013588
7.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0101015544
8.	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA	0101013822
9.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	0101014388
10.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0101012822
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0101012177
12.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	0101013812
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0101013399
14.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	0101020401
15.	DINAS KESEHATAN	0101012033
16.	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0101005255
17.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0101020410
18.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0101018422
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0101020398
20.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0101014822
21.	DINAS SOSIAL	0101013699
22.	DINAS PERHUBUNGAN	0101012088
23.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0101018233
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0101010830
25.	BADAN KEUANGAN	0101013766
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0101013022
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0101015998

1	2	3
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0101013880
29.	KEC. SINE	0101018099
30.	KEC. NGRAMBE	0101018066
31.	KEC. JOGOROGO	0101018000
32.	KEC. KENDAL	0101018022
33.	KEC. GENENG	0101015666
34.	KEC. KWADUNGAN	0101018355
35.	KEC. KARANGJATI	0101018722
36.	KEC. BRINGIN	0101018999
37.	KEC. PADAS	0101018533
38.	KEC. NGAWI	0101018055
39.	KEC. PARON	0101018433
40.	KEC. KEDUNGGALAR	0101018011
41.	KEC. PITU	0101018133
42.	KEC. WIDODAREN	0101018200
43.	KEC. MANTINGAN	0101018544
44.	KEC. KARANGANYAR	0101018211
45.	KEC. GERIH	0101010856
46.	KEC. KASREMAN	0101010848
47.	KEC. PANGKUR	0101018633

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO